

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan diplomasi publik Australia melalui LP2M di Kabupaten Padang Pariaman. Pada penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Bruce Gregory dalam menganalisis aktivitas diplomasi publik ini. Dari hasil pembahasan yang coba dijelaskan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Australia telah mengembangkan kesiapan yang kuat dalam menjalankan aktivitas diplomasi publiknya. Hal tersebut tercermin dari kesadaran pemerintah DFAT Australia terhadap pentingnya peran *soft power* sebagai instrumen untuk membangun citra positif dan memperoleh dukungan dari masyarakat internasional. Dalam pelaksanaannya, dominasi kawasan menjadi salah satu modal utama yang dimanfaatkan Australia untuk memperkuat pengaruhnya melalui berbagai program *soft power* di tingkat global.

Meskipun Australia mengakui dominasi Barat dalam struktur sistem internasional, kondisi tersebut mendorong proses adaptasi dan pembentukan institusi yang merefleksikan identitas serta kepentingan nasionalnya. Kesiapan diplomasi publik Australia terlihat dari kemampuannya memahami karakteristik negara sasaran *soft power*. Dalam konteks Australia–Indonesia, Indonesia menjadi ruang strategis karena adanya kebutuhan terhadap pembangunan inklusif dan pertukaran nilai, yang kemudian diwujudkan melalui program INKLUSI sebagai instrumen diplomasi publik yang terlembaga dengan dukungan kebijakan, pendanaan, serta koordinasi bersama mitra lokal seperti LP2M di Padang Pariaman. Perencanaan strategis program INKLUSI memperkuat fungsinya sebagai instrumen diplomasi publik melalui pendekatan berbasis integrasi masyarakat lokal. Melalui mekanisme koordinasi

dengan LP2M, program ini dirancang untuk membangun keterikatan sosial, memperluas jaringan kerja sama, serta memperkuat pertukaran nilai antara Australia dan masyarakat Padang Pariaman.

Keterlibatan aktif Australia melalui LP2M diwujudkan melalui ruang interaksi, dialog, dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi publik. Aktivitas tersebut tidak hanya mendukung pembangunan inklusif, tetapi juga membangun hubungan antarmasyarakat (*people-to-people relations*) serta menciptakan pemahaman bersama mengenai nilai dan kepentingan yang dipromosikan Australia. Di sisi lain, Australia juga menjalankan fungsi advokasi melalui pemanfaatan saluran komunikasi LP2M untuk menyampaikan narasi yang selaras dengan kepentingan nasionalnya. Melalui komunikasi publik tersebut, LP2M berperan sebagai medium pembentukan citra positif Australia di Padang Pariaman, yang tercermin dari penerimaan masyarakat terhadap keberadaan dan pelaksanaan program INKLUSI.

Secara keseluruhan, keempat aktivitas tersebut menunjukkan bahwa diplomasi publik Australia melalui LP2M dijalankan melalui proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. LP2M tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan bahasa dan budaya yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat global serta membangun pemahaman lintas budaya, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis bagi Australia dalam membentuk citra positif, memperluas pengaruh budaya, dan mencapai kepentingan nasionalnya di tingkat internasional. Dalam konteks ini, Padang Pariaman menjadi salah satu target strategis karena memiliki kondisi sosial dan politik yang mendukung pelaksanaan diplomasi budaya Australia melalui LP2M di Padang Pariaman.

5.2 Saran

Sebagai bentuk akhir dari penelitian ini, disarankan agar pemerintah

Australia untuk melakukan pengawasan yang lebih komprehensif tidak hanya terkait pendanaan namun juga pelaksanaan program dan mengubah pendekatan komunikasi mitra pelaksana agar lebih menjelaskan peran Australia dalam pelaksanaan program agar tidak menimbulkan persepsi yang membingungkan akan institusi dan negara di mata publik global. Bagi Lembaga Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat (LP2M) dalam memaksimalkan pelaksanaan program di berbagai wilayah di Sumatera Barat ini perlu menjadi suatu perhatian dan peningkatan kapasitas anggota atau staff untuk menjalankan operasional lembaga agar terjaminnya tujuan program dan kepentingan lokal tetap terjaga. Serta ketergantungan LP2M terhadap pendanaan memberikan ruang lebih bagi Australia mengarahkan aktivitas program INKLUSI, sehingga pemerintah perlu membuat batasan yang jelas akan bentuk kemitraan.

Bagi para akademisi dan peneliti dimasa depan, penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian dan pengembangan kajian terutama melalui sejumlah pendekatan lapangan maupun perbandingan lintas negara. Serta penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan terhadap praktik diplomasi publik dalam konteks di kawasan Indo-Pasifik. Dengan penutup ini, diharapkan hasil penelitian yang dibentuk melalui sejumlah narasi deskriptif dapat berkontribusi bagi kajian studi hubungan internasional.